

OMBUDSMAN

Ahmad Doli Kurnia: Ukuran Keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah Kinerja Kementerian itu Sendiri, Bukan Atribut Baru

Tony Rosyid - OMBUDSMAN.CO.ID

Jul 27, 2022 - 19:50



Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung

JAKARTA - Komisi II DPR RI menilai masih banyak masalah pertanahan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan penggantian seragam baru di jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang lengkap dengan tanda pangkat, berbareng hingga tingkat komando.

“Ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Bukan atribut baru, bagus, atau tidak. Masih banyak masalah pertanahan di negara ini yang harus diselesaikan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan, Rabu kemarin (27/7/2022). Pihaknya, lanjut Doli, serta masyarakat tentunya, menunggu terobosan baru dari Kementerian ATR/BPN, bukan kostum di jajarannya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ia menilai penggantian seragam baru di Kementerian ATR/BPN jelas tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, terlebih dalam pemberantasan mafia tanah.

"Pejabat ATR/ BPN bukan penegak hukum, bukan penyidik. Yang diperlukan saat ini bukan baret dan tingkat komando, tapi pikiran dan hati para pejabat. Pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan," ujar Junimart dalam kesempatan yang berbeda.

Junimart juga mempertanyakan filosofi dan urgensi dari kebijakan baru dari Menteri ATR/BPN yang baru, Hadi Tjahjanto tersebut. Politisi dari Fraksi PDI perjuangan ini bahkan mengaku penasaran dengan korelasi dari penggunaan baret hingga tingkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.

"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tingkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya, apa filosofinya? Tapi Kita lihat saja nanti setelah memakai baret dan tingkat komando apakah hasil kerjanya signifikan atau tidak," ujar politisi yang juga merangkap sebagai Ketua panitia kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI ini.

Dikutip dari beberapa media, Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa inovasi seragam baru tersebut sengaja diinisiasinya dengan harapan agar kewibawaan para kepala ATR/BPN di wilayah bertambah sehingga berani dalam memberantas mafia tanah. (ayu/aha)